



SABTU, 05 MEI 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

SPP Dinas Jadi Temuan BPK RI

KEPAHIANG, BE - Anggaran perjalanan dinas menjadi salah satu objek temuan indikasi kerugian negara dalam audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Bengkulu. Dana SPP Dinas pejabat dan ASN dalam APBD 2017 Kabupaten Kepahiang jadi temuan karena adanya kekurangan berkas laporan oleh bendahara terkait.

Temuan SPP Dinas diakui Kepala Inspektorat Daerah, Harun, SE. Ak, M.Si yang saat ini diharapkan dapat diklarifikasi secara tuntas oleh OPD terkait sebelum pelaksanaan audit tuntas 28 Mei 2018 mendatang. "SPP Dinas ada, namun untuk nominalnya saya belum bisa sebutkan. Sebab masih bisa diklarifikasi, bisa saja nanti berubah tidak jadi temuan," tutur Harun.

Sekalipun mengakui adanya anggaran perjalanan dinas yang belum dapat dipertanggungjawabkan secara tuntas hingga jadi temuan sementara BPK RI, Inspektorat menolak menyebut temuan itu dikatakan indikasi perjalanan dinas fiktif atau bohongan. "SPP Dinas memang ada temuan, tetapi ndaklah fiktif. Iya ada, tetapi belum bisa diungkapkan angkanya karena masih ada proses," katanya.

Sebelumnya, audit penggunaan keuangan APBD 2017 Kabupaten Kepahiang hampir dirampungkan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Bengkulu. Sementara ini, BPK RI Perwakilan Bengkulu menemukan indikasi kerugian negara di 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam

pengelolaan APBD tahun lalu.

Indikasi kerugian keuangan negara terjadi karena SPJ Bendahara belum lengkap hingga disinyalir adanya penyelewengan dana dalam penyerapan anggaran. Sehingga dana terserap tak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, hingga jadi temuan BPK RI. "Delapan OPD kalau tidak salah, sebagai besar. Biasanya besar-besarnya dikasih sampel kan biasanya OPD besar-besarnya," tuturnya.

OPD besar di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang yang menjadi sampel pemeriksaan BPK RI diantaranya Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan Kebudayaan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian. (320)